

ABSTRAK

Perubahan iklim merupakan permasalahan dunia yang mendesak yang disebabkan adanya pemanasan global dengan salah satu penyebabnya, yaitu adanya peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satu sektor yang masih menyumbang emisi GRK adalah pada sektor transportasi. Untuk menanggulangi hal tersebut maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan sebagai landasan hukum peralihan penggunaan kendaraan konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dalam pelaksanaannya perlu ditinjau kembali bagaimana dampak dari kebijakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL Berbasis Baterai) terhadap lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penulisan hukum doktrinal dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat prospek yang menjanjikan dari adanya kebijakan KBL Berbasis Baterai sebagai upaya transisi energi menjadi energi baru terbarukan serta memberikan peluang bagi sektor industri nikel dalam negeri dengan adanya peraturan turunan yang mengatur lebih teknis pelaksanaan dari kebijakan KBL Berbasis Baterai. Namun, kebijakan KBL Berbasis Baterai memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup. Kebijakan KBL Berbasis Baterai telah memberikan penurunan emisi GRK dalam sektor transportasi di Indonesia, namun secara bersamaan memberikan ancaman kerusakan lingkungan dengan adanya aktivitas penambangan nikel, penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan air limbah dari limbah baterai yang tidak sejalan dengan prinsip dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Implikasi Kebijakan; Kendaraan Bermotor Listrik; Lingkungan Hidup

ABSTRACT

Climate Change is an urgent global problem caused by global warming with one of the causes being an increase in greenhouse gas emissions (GHG). One of the sectors that massively contributes to GHG is the transportation sector. To overcome this, Presidential Regulation Number 55 of 2019 on Accelerating Programs of Battery Electric Vehicles for Road Transportation was issued as a legal basis for transitioning the use of conventional vehicles to battery electric vehicles. In its implementation, it is necessary to review the impact of the battery electric vehicle policy to the environment.

The research uses qualitative research with doctrinal legal research methodology with a statute approach and case approach. The specifications used in this research is descriptive analytical with the data collection technique in the form of literature study to collect secondary data. Technical data analysis in this research uses qualitative descriptive analysis.

The results of this research state that there are promising prospects from the existence of the Battery Electric Vehicles policy as an effort for energy transition to new renewable energy and provides opportunities for the domestic nickel industry with derivative regulations that regulate more technical implementation of the Battery Electric Vehicles policy. However, the Battery Electric Vehicles policy has positive and negative impacts on the environment. The Battery Electric Vehicles policy has reduced GHG in the transportation sector in Indonesia, but at the same time poses a threat of environmental damage with nickel mining activities, the use of steam-electric power plant (PLTU) and wastewater from battery waste that is not in line with the principles in the law.

Keywords : Policy Implications; Electric Vehicles, Environment